

Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan¹

TITIN PURWANINGSIH*

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Kampus Terpadu UMY, Jl. Lingkar Selatan, Bantul, Yogyakarta, 55183
Indonesia
E-mail: titin_p_widodo@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan elaborasi terhadap berkembangnya fenomena politik kekerabatan di Sulawesi Selatan, terutama dari perspektif kualitas kandidat yang dimiliki oleh calon yang berasal dari keluarga politik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan terjadinya pewarisan ketertarikan pada politik dalam keluarga melalui diskusi politik dalam keluarga, aktivitas di partai politik maupun organisasi sosial yang menjadi modal sebagai politisi. Pewarisan jaringan dan nama besar keluarga juga mempengaruhi dukungan publik kepada kandidat. Pilkada langsung dan sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak memberikan kesempatan yang lebih besar kepada keluarga politik untuk memperoleh atau memperbesar kekuasaannya sehingga jumlah anggota keluarga yang menduduki jabatan politik semakin meningkat. Meskipun demikian, indeks kualitas kandidat dari keluarga politik cenderung menurun yang dipengaruhi oleh semakin muda usia kandidat untuk memperoleh kekuasaan karena adanya peluang yang diberikan oleh partai-partai politik baru. Kualitas kandidat ini merupakan unsur penting dalam memaknai politik kekerabatan, yang melengkapi ciri politik kekerabatan dari Hess, Casey, Asako maupun Dal Bo dan Querobin.

Kata kunci: politik kekerabatan, politik keluarga, warisan politik, kualitas kandidat

ABSTRACT

This paper aims to elaborate the increase of political kinship phenomenon in South Sulawesi, especially from the perspective of political legacy of a candidate from particular political family. Utilizing a qualitative research method, the paper reveals that in kinship politics, interest in politics is transferred through political discussions within family, activities in political parties and social organizations. There is also process of transferring networks and family brands that will help a candidate to gain public supports. This paper also reveals that direct elections of local leaders and majority votes of proportional open list election system open more opportunities for political family to increase more power as family members are being elected in political leaderships. However, the quality of candidates tends to decrease as shown by relatively younger candidates with less political experience. The new political parties and the lack of regeneration provide opportunities for the members of political family to gain power in their early age. This paper suggests that the quality of candidate is an important feature of kinship politics which will enrich the previous studies in the characteristics of kinship politics as argued by Hess, Casey, Asako as well as Dal Bo and Querobin.

Keywords: kinship politics, political family, political legacy, candidate quality

* Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Univ. Muhammadiyah Yogyakarta. Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian Disertasi Program Doktor Ilmu Politik FISIP UI, 2014.

PENDAHULUAN

Fenomena politik kekerabatan dapat dikatakan semakin meningkat, baik dalam jabatan politik di lembaga legislatif (DPRD/DPR/DPD) maupun dalam jabatan eksekutif sebagai Kelapa Daerah. Politik kekerabatan itu sendiri terjadi baik pada tingkat nasional maupun lokal. Pada tingkat lokal, terdapat beberapa fenomena politik kekerabatan seperti di Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Indramayu, Bantul, Lampung, Kutai Kartanegara, dan Bali.

Fenomena politik kekerabatan sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara-negara lain seperti Filipina, Srilanka, Thailand, bahkan di negara-negara maju seperti Belgia dan Amerika Serikat. Dalam penelitiannya Stephen Hess menyatakan bahwa di Amerika Serikat terdapat 22 dinasti politik (dalam Kurtz II 1989). Di Indonesia, politik kekerabatan menjadi problematik sehingga Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota melarang keluarga petahana untuk mencalonkan diri. Mengapa fenomena politik kekerabatan berkembang di Indonesia? Apakah politik kekerabatan berkembang karena adanya pewarisan ketertarikan politik ataukah karena pragmatisme politik? Apakah kandidat dari keluarga politik hanya mengandalkan popularitas keluarga dan tidak disertai dengan kualitas yang memadai?

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam kajian politik kekerabatan yang sebagian besarnya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik kekerabatan dan kompetisi keluarga politik dalam pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Dal Bo dkk (2006) mengenai politik kekerabatan di Amerika Serikat maupun Pablo Querubin (2011) dan Mendoza *et.al* (2012) mengenai politik kekerabatan di Filipina menunjukkan hasil yang sama, yaitu bahwa kandidat yang berasal dari keluarga politik mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan pemilu. Hasil penelitian Dal Bo dkk menunjukkan bahwa seorang legislator yang kerabatnya telah menduduki jabatan politik cenderung mempunyai peluang yang lebih besar untuk terpilih. Dengan kata lain, seseorang yang berkuasa, mempunyai peluang yang

lebih besar untuk mempertahankan kekuasaannya dan lebih memungkinkan untuk membentuk dinasti politik. Hal ini disebabkan karena *political capital* yang terkait dengan mesin politik dapat diwariskan dalam keluarga. Oleh karena itu, fenomena politik kekerabatan tetap bertahan sampai saat ini.

Daniel Markham Smith (2012) juga melakukan penelitian dinasti di Jepang yang menganalisis pengaruh sistem pemilu terhadap dinasti politik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pemilu yang berfokus pada kandidat (*candidate centered elections*) menguntungkan keluarga politik karena kandidat dari keluarga politik lebih dikenal oleh publik. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa politik dinasti justru berkembang pada era demokratisasi karena keunggulan *incumbent*, desentralisasi dalam rekrutmen, dan sistem pemilu yang berpusat pada kandidat.

Sementara itu, kajian politik kekerabatan di Indonesia belum banyak dilakukan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Syarif Hidayat (dalam Nordholt dan Klinken 2007). Namun studi tersebut lebih menyoroti kuatnya politik lokal di Banten dari perspektif *shadow state* dan ekonomi politik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kuatnya politik lokal di Banten terjadi karena pergeseran interaksi antara *state* dan *society*, terutama pada interaksi *local state actors* (elite pemerintahan lokal) dan *societal actors* (jawara-pengusaha) dan terjadi *shadow state* dengan peran Tuan Besar. Andi Faisal Bakti (dalam Nordholt dan Klinken 2007) dalam penelitiannya mengenai kekuasaan keluarga di Wajo Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah telah memperkuat pemerintahan otokratis. Meskipun penelitian-penelitian tersebut mengkaji elite politik, namun terkait dengan kajian politik kekerabatan. Wasisto Raharjo Djati (2013) yang meneliti familisme dalam demokrasi lokal menunjukkan bahwa familisme dipengaruhi oleh berbagai sumber politik seperti populisme, tribalisme dan feodalisme yang ketiganya membentuk tipologi rezim dinasti politik yang berbeda di Indonesia. Menurut Wasisto, karakter dinasti politik di Sulawesi Selatan adalah *tribalism dynasties* yang terbentuk dari reproduksi ritus-ritus budaya etnis, ikatan primordialisme, klan politik, dan stratifikasi sosial.

Artikel ini juga mengkaji faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik kekerabatan di Indonesia dari variabel internal kandidat. Faktor dimaksud difokuskan pada pertanyaan apakah maraknya politik kekerabatan karena modal politik yang dimiliki oleh keluarga sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Dal Bo, Querobin, maupun Hess. Tak hanya itu, artikel ini juga menganalisis politik kekerabatan secara lebih mendalam dengan melihat apakah kandidat yang berasal dari keluarga politik mempunyai kualitas yang dibutuhkan dalam rekrutmen politik. Analisis terhadap kualitas kandidat mengacu kepada teori Almond dan Verba (1989) maupun Jacobson dan Kernell (1983) yang menyatakan bahwa kompetensi kandidat dipengaruhi oleh pengalaman politik sebelumnya. Dengan analisis indeks mengenai kualitas kandidat, artikel ini juga menganalisis bagaimana kualitas kandidat dari keluarga politik: apakah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sebagai politisi ataukah sekedar mengandalkan nama besar keluarga.

Ada beberapa alasan mengapa penulis mengambil kasus Sulawesi Selatan. **Pertama**, dilihat dari aspek historis, wilayah Sulawesi Selatan merupakan bekas wilayah kerajaan Gowa-Tallo, Bone, Wajo dan Soppeng dan budaya Sulawesi Selatan yang berdasarkan hubungan patron-klien masih berkembang sampai saat ini. **Kedua**, politik di Sulawesi Selatan diwarnai oleh kompetisi etnis, terutama antara etnis Bugis dan Makassar. **Ketiga**, di Sulawesi Selatan terdapat fenomena politik kekerabatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang berasal dari beberapa keluarga antara lain dari keluarga Syahrul Yasin Limpo, keluarga Ilham Arif Sirajuddin, keluarga Qahhar Muzzakar, keluarga Amin Syam, keluarga Padjalangi, keluarga Nurdin Halid, dan keluarga Andi Idris Galigo. **Keempat**, identifikasi partai politik dalam satu keluarga di Sulawesi Selatan belum tentu sama.

KERANGKA TEORETIS

Politik kekerabatan sering juga disebut politik dinasti¹, meski sampai sekarang tidak ada definisi yang seragam. Menurut Ernesto Dal Bo

¹ Pablo Querobin dalam penelitiannya di Filipina, Ernesto Dalbo dkk dalam penelitiannya di Amerika Serikat, Yasushi Asako dkk dalam penelitiannya di Jepang dan Hess dalam pene-

(2006), politik dinasti terjadi apabila seorang politisi mempunyai hubungan keluarga dengan politisi sebelumnya. Hal ini senada dengan pengertian dari Pablo Querobin (2011) yang menyatakan bahwa politik dinasti merupakan bentuk khusus dari upaya elite untuk mempertahankan kekuasaan yang mana satu atau beberapa kelompok keluarga memonopoli kekuasaan politik. Menurut Yasushi Asako (2012), politik dinasti terjadi apabila satu anggota keluarga menduduki jabatan politik yang sebelumnya dijabat oleh kerabatnya. Menurut Stephen Hess (dalam Kurtz II 1989), *“political dynasty as any family that has had at least four members, in the same name, elected to federal office”* (dinasti politik terjadi apabila terdapat empat atau lebih anggota keluarga dalam satu garis keturunan menduduki jabatan politik). Menurut Casey (2009 : 94-95), *“political kinship or political family membership is defined as either a tie of affinity or a consanguineous connection within two generations from the candidate”*. (Kekerabatan politik ataupun keluarga politik terjadi apabila terdapat hubungan darah ataupun perkawinan dalam dua generasi kandidat pejabat politik).

Dari berbagai pengertian tersebut, terdapat beberapa dimensi politik dari dinasti ataupun politik kekerabatan yaitu dimensi waktu (keluarga dari pejabat politik sebelumnya, minimal 2 periode kekuasaan), dimensi jumlah (2 orang atau lebih menurut Pablo, Asako dan Dal Bo; 4 orang menurut Hess dan 2 generasi menurut Casey), dimensi jabatan politik (jabatan politik yang sama ataupun berbeda), dan dimensi kekuasaan (mempertahankan atau memperbesar kekuasaan).

Dilihat dari dimensi jumlah, penulis lebih sepakat dengan Pablo, Asako maupun Dal Bo bahwa politik dinasti atau politik kekerabatan apabila terdapat dua orang atau lebih dalam satu keluarga yang menduduki jabatan politik. Dari kedua orang anggota keluarga tersebut, kecenderungan terjadi politik kekerabatan terjadi pada orang kedua. Jumlah dua orang ini konsisten dengan dimensi waktu, dua periode kekuasaan. Namun demikian, menurut penulis, terdapat satu dimensi penting yang belum dimasukkan dalam pengertian politik kekerabatan

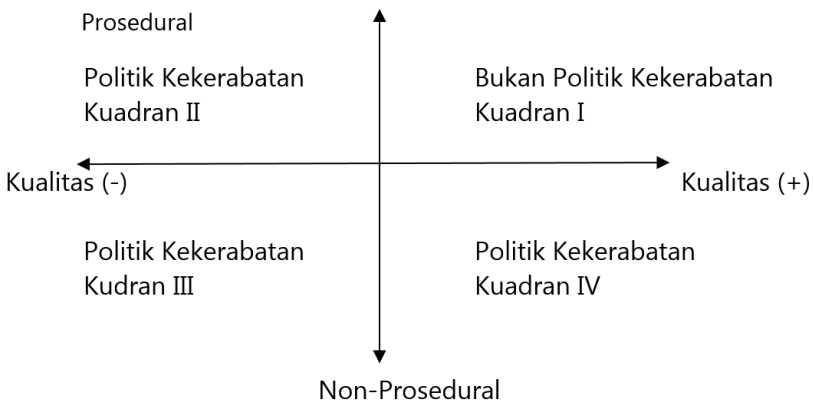
litiannya di Amerika Serikat menggunakan istilah politik dinasti, sedangkan Casey dalam penelitiannya di Amerika Serikat menggunakan istilah politik politik kekerabatan.

ataupun politik dinasti yaitu dimensi rekrutmen politik yang terdiri dari proses rekrutmen yang demokratis dan kualitas kandidat dalam rekrutmen politik tersebut.

Politik kekerabatan terjadi apabila rekrutmen politik berdasarkan kepada pertimbangan hubungan kekerabatan dan tidak berdasarkan pada aspek kualifikasi kandidat. Dari berbagai dimensi tersebut, maka politik kekerabatan dalam penelitian ini adalah rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya (baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan). Artikel ini menggunakan istilah politik kekerabatan, bukan politik dinasti, untuk meminimalisir distorsi dinasti yang sering dimaknai dengan sistem kerajaan.

Untuk membedakan anggota keluarga politik yang memperoleh jabatan politik sebagai manifestasi politik kekerabatan dan bukan politik kekerabatan, dilakukan dengan menganalisis dua aspek yaitu prosedur dalam rekrutmen politik dan kualitas kandidat. Dari prosedur rekrutmen politik dan kualitas kandidat, pemilahan politik kekerabatan dapat dilihat dari 4 (empat) kuadran, seperti dalam bagan berikut:

Bagan 1. Kuadran Pemilihan Politik Kekerabatan



Bagan 1 tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari prosedur rekrutmen politik dan kualitas kandidat, terdapat 4 (empat) kuadran, yaitu kuadran I (prosedural-berkualitas), kuadran II (prosedural-non kualitas), kuadran III (non prosedural-non kualitas) dan kuadran IV (non prosedural-berkualitas). Dilihat dari 4 (empat) kuadran tersebut, kuadran I adalah anggota keluarga politik yang memperoleh jabatan politik melalui prosedur rekrutmen yang ditetapkan dan mempunyai kualitas yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen politik. Pada kuadran I ini bukan merupakan manifestasi dari politik kekerabatan, meskipun berasal dari keluarga politik. Kuadran II, III dan IV merupakan manifestasi dari politik kekerabatan karena tidak memenuhi salah satu ataupun kedua unsur, yaitu rekrutmen yang berdasar prosedur yang digariskan dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam rekrutmen politik. Dari dua unsur tersebut, artikel ini menitikberatkan pada aspek kualitas kandidat.

Norris (1997) membagi analisis rekrutmen politik dalam empat level analisis yaitu: 1) analisis pada level sistem politik yang terdiri dari sistem hukum, sistem pemilu dan sistem kepartaian; 2) proses rekrutmen yang menganalisis demokrasi internal partai; 3) analisis terhadap para kandidat; dan 4) level analisis pada selektor. Dalam konteks politik kekerabatan, analisis dalam artikel ini menitikberatkan pada analisis terhadap kandidat yang berasal dari keluarga politik.

Variabel internal kandidat dalam rekrutmen politik menitikberatkan pada modal yang dimiliki kandidat dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen. Norris dan Lovenduski (1993) menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi masuknya anggota kekerabatan ke dalam politik yaitu motivasi dan modal politik. Menurut Prewitt (dalam Kurtz II 1989), keluarga politik terjadi karena dua hal yaitu adanya pewarisan ketertarikan politik dari orang tua kepada anaknya dan seorang anak meneruskan pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya. Aspek sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua menjadi salah satu faktor munculnya politik kekerabatan. Selain itu, kandidat dari keluarga politik biasanya mempunyai modal politik yang memadai yang terdiri dari jaringan politik, pendidikan, pengalaman, dan sumber daya keuangan.

Almond dan Verba (1989: 269-270) menyatakan bahwa sosialisasi politik dan pengalaman politik bersifat kumulatif mempengaruhi kemampuan politik seseorang. Prewitt (dalam Liefferinge dan Steyvers 2009) mengkaji secara lebih spesifik teori Almond dan Verba dalam konteks keluarga politik. Menurutnya :

“...This over-exposure or strong political socialization is considered to be a very important self-recruiting mechanism among future politicians, whereas social background characteristics, functional demands or personality traits are important selection criteria.”

Prewitt menyatakan bahwa dalam keluarga politik terjadi sosialisasi politik yang kuat sehingga kandidat dari politik kekerabatan mempunyai aspek personal yang dibutuhkan dalam kriteria seleksi. Prewitt tidak menyebutkan secara spesifik yang dimaksudkan dengan aspek personal dalam kriteria seleksi tersebut, namun Martinez (2010) dalam penelitiannya di Amerika Serikat menyebutkan bahwa sosialisasi politik dalam keluarga menentukan tingkat aktivisme politik, identifikasi partai, pengetahuan dan ketrampilan politiknya.

“The family, according to theories of childhood socialization, affects the acquisition of participant values; these values then determine subsequent levels of political activism, party identification, political knowledge, and sense of political efficacy. Exposure in the home to political talk and activism is thus linked to future political behaviour.”

Dengan kata lain bahwa sosialisasi politik dalam keluarga menentukan kualitas yang dimiliki kandidat dalam rekrutmen politik. Kualitas kandidat ini merupakan aspek utama dari variabel internal kandidat yang dianalisis dalam penelitian ini. Dalam kasus Indonesia, masalah kualitas kandidat yang berasal dari politik kekerabatan masih diperdebatkan dan sebagian menganggap bahwa kandidat dari politik kekerabatan mengandalkan popularitas keluarga semata.

Analisis terhadap variabel internal kandidat dalam penelitian ini menyangkut *legacy* politik yang dimiliki, baik *legacy* politik maupun

sosial yang akan mempengaruhi kualitas kandidat yang berasal dari keluarga politik. Kualitas kandidat adalah karakteristik yang dimiliki oleh kandidat yang memungkinkan baginya untuk dipilih dalam jabatan politik dan menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang politisi (Jacobson dan Kernell 1983), namun demikian belum ada indikator yang baku untuk mengukur kualitas kandidat. Kualitas ataupun kompetensi politik, menurut Almond dan Verba, dipengaruhi oleh partisipasi ataupun pengalaman politik sebelumnya, antara lain partisipasi dalam keluarga, sekolah maupun pekerjaan. Lebih lanjut Almond dan Verba (1989: 301) menyatakan bahwa pengaruh partisipasi dalam keluarga, sekolah dan pekerjaan terhadap kompetensi bersifat kumulatif. Semakin aktif dalam politik, semakin baik kompetensinya. Menurut Jacobson dan Kernell (1983), kualitas kandidat diukur dari pengalaman politik sebelumnya.

Dari berbagai pendapat tersebut maka kualitas kandidat dalam artikel ini meliputi tiga variabel yaitu pendidikan, pelatihan dan pengalaman politik yang dimiliki oleh kandidat. Pengalaman politik dalam penelitian ini dilihat dari tiga aspek, yaitu aktivitasnya dalam partai politik, pengalaman dalam organisasi, dan pengalaman dalam pekerjaan sebelumnya. Analisis tentang kualitas kandidat tersebut digunakan untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik kekerabatan di Sulawesi Selatan yang mengacu kepada teori sosialisasi dari Almond dan Verba serta Prewitt dan Martinez.

METODE PENELITIAN

Artikel ini berangkat dari hasil penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang dilakukan bersifat *exploratory research*. Penelitian ini juga merupakan penelitian studi kasus, yaitu politik kekerabatan di Sulawesi Selatan, dengan unit analisis kandidat yang berasal dari keluarga politik yang memperoleh jabatan politik pertama kali dalam pemilu 2009, yang berasal dari 4 keluarga politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan *in-depth interview*. Studi dokumentasi dilakukan mengenai riwayat hidup kandidat, data perolehan suara, dan aktivitas politik dari keluarga politisi yang didapat dari berita media, KPU/KPUD, maupun hasil-hasil

penelitian sebelumnya. Wawancara dilakukan kepada kandidat yang berasal dari keluarga politisi maupun tokoh masyarakat yang diambil dengan metode *snow-ball*. Wawancara dengan politisi yang berasal dari keluarga politik dilakukan terkait biografi kandidat, pengalaman politik, motivasi, proses rekrutmen dan dukungan keluarga dalam proses pencalonan. Sedangkan wawancara dengan tokoh masyarakat dilakukan untuk memperoleh data terkait peran kandidat dan kualitas kandidat yang berasal dari keluarga politik.

Teknik analisis data adalah deskriptif analitis, dengan menganalisis *legacy* politik yang dimiliki dalam keluarga pada masing-masing kandidat, jaringan yang dimiliki, perolehan suara dan kualitas kandidat yang berasal dari keluarga politik. Analisis kualitatif yang dilakukan didukung dengan data-data kuantitatif, khususnya melalui analisis indeks tentang kualitas kandidat yang berasal dari keluarga politik. Kualitas kandidat dilihat dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman politiknya, baik pengalaman dalam organisasi partai, organisasi sosial maupun pekerjaan.

Tabel 1. Penjabaran Indikator Kualitas Kandidat

Variabel	Kriteria	Indikator	Coding
Pendidikan	Pendidikan	Keterkaitan pendidikan dengan politik	1 = ilmu non-sosial 2 = ilmu sosial 3 = ilmu politik, Administrasi, pemerintahan, hubungan internasional, hukum
		Jenjang pendidikan	1 = SMA 2 = S1 3 = S2
Pelatihan	Pelatihan Kepemimpinan	Keikutsertaan dalam pelatihan kepemimpinan	1 = tingkat dasar 2 = tingkat menengah 3 = tingkat lanjut/tinggi
	Pelatihan Kampanye	Keikutsertaan dalam pelatihan kampanye	1 = tidak pernah 2 = 1x 3 = 2 atau lebih/menjadi pelatih
	Pelatihan Kader Partai	Keikutsertaan dalam pelatihan kader	1 = pelatihan dasar 2 = pelatihan menengah 3 = pelatihan lanjut/ tinggi
Pengalaman politik	Pengalaman dalam partai politik	Lama bergabung dengan partai politik	1 = < 5 th 2 = 5-10 th 3 = > 10 th
		Jabatan dalam partai politik	1 = anggota 2 = pengurus, tetapi bukan pengurus harian 3 = pimpinan

Variabel	Kriteria	Indikator	Coding
Pengalaman politik	Pengalaman dalam partai politik	Pengalaman dalam kampanye	1 = tidak pernah 2 = sebagai peserta 3 = sebagai jurkam
		Tingkatan kepengurusan dalam partai	1 = tidak ada 2 = pengurus kecamatan 3 = Pengurus tingkat Kabupaten/provinsi
	Pengalaman dalam organisasi sosial	Lama aktif dalam organisasi sosial	1 = < 5 tahun 2 = 5-10 tahun 3 = > 10 tahun
		Jabatan dalam organisasi sosial	1 = tidak ada 2 = anggota 3 = pengurus
		Tingkatan organisasi sosial	1 = tidak ada 2 = level kab/kota 3 = level provinsi/ nasional
	Pengalaman pekerjaan	Mekanisme menjadi pengurus/pimpinan organisasi	1 = ditunjuk 2 = dipilih pimpinan 3 = dipilih anggota
		Relevansi pekerjaan dengan politik	1 = tidak relevan (misal: teknik, dokter) 2 = kurang relevan (wirausaha) 3 = relevan (asisten bidang politik, pegawai pemda, pengacara, militer)
		Lama pengalaman kerja	1 = < 1 tahun 2 = 1- 3 th 3 = > 3 th
		Jabatan dalam pekerjaan	1 = tidak ada 2 = pimpinan organisasi swasta 3 = pimpinan organisasi publik
		Keterlibatan dalam organisasi profesi	1 = tidak ada 2 = sebagai anggota 3 = sebagai pengurus

TEMUAN DAN ANALISIS

Fenomena politik kekerabatan di Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari beberapa keluarga, namun kekerabatan Muhammad Yasin Limpo adalah yang terkuat saat ini yang mempunyai jumlah anggota keluarga yang menduduki jabatan politik paling banyak dibanding dengan keluarga yang lain. Fenomena politik kekerabatan di Provinsi Sulawesi Selatan bisa dilihat dari Tabel 2. Tabel tersebut menunjukkan bahwa politik kekerabatan merupakan fenomena umum di Provinsi Sulawesi Selatan, tidak hanya berasal dari satu keluarga namun beberapa keluarga. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa fenomena politik kekerabatan terjadi baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan.

Tabel 2. Fenomena Politik Kekerabatan di Provinsi Sulawesi Selatan

Keluarga	Nama/Hubungan Kekerabatan	Jabatan	Partai Pengusung	Jabatan dalam Partai
Muhammad Yasin Limpo*	1.Syahrul Yasin Limpo/ anak Yasin Limpo	-Gubernur Sulawesi Selatan (2008-1013 dan 2013-2018). -Wakil Gubernur (2003-2008) -Bupati Gowa (1994-2002)	PDK,PAN, PDIP	Ketua DPD Golkar Sulsel (2009-2014)
	2.Sitti Nurhayati/ Istri M Yasin Limpo	-Anggota DPRD Sul-Sel (1987-1992, 1992-1997, 1997-1999) -Anggota DPR RI (2004-2009)	Partai Golkar	
	3. Tenri Olle/anak Yasin Limpo/Kakak Gubernur	-Anggota DPRD Gowa (2004-2009) -Anggota DPRD Sulsel (2009-2014)	Partai Golkar	Ketua DPD Golkar Gowa
	4. Ichsan Yasin Limpo/ Anak M Yasin Limpo/ adik Gubernur	-Anggota DPRD Sulsel (1999-2004) -Bupati Gowa (2005-2010 dan 2010-2015)	Partai Golkar	Bendahara Partai Golkar Sulawesi Selatan (2009-2015)
	5. Haris Yasin Limpo/ Anak M Yasin Limpo/ adik Gubernur	Anggota DPRD Kota Makassar (2004-2009 dan 2009-2014)	Partai Golkar	Ketua DPD Golkar Kota Makassar
	6. Dewi Yasin Limpo/ anak M. Yasin Limpo	Mantan caleg DPR RI 2009	Partai Hanura	Ketua DPD Hanura Sulsel
	7. Indira Thita Chundra/ anak Syahrul Yasin Limpo	Anggota DPR RI (2009-2014)	PAN	Wakil Sekjen PAN 2010-2015
	8. Adnan Purichta/ anak Ichsan Yasin Limpo	Anggota DPRD Sulawesi Selatan (2009-2014)	Partai Demokrat	
Qahhar Muzzakar**	1.Aziz Qahhar Muzzakar/ anak Qahhar Muzzakar	Anggota DPD RI (2004-2009 dan 2009-1014)		
	2.Buhari Qahhar Muzzakar/ adik Aziz Muzzakar	Anggota DPRD Sulawesi Selatan (2004-2009 dan 2009-2014)	PAN	Sekretaris PAN Sulsel
	3.Andi Muzzakar/ adik Aziz Muzzakar	Bupati Luwu (2008-2013)	Partai Golkar	Ketua DPD Golkar Luwu
Arief Sirajudin***	1.Ilham Arief Sirajuddin/ anak Arief Sirajuddin	-Anggota DPRD Sulawesi Selatan (1999-2004) -Walikota Makassar (2004-2009 dan 2009-2014)	Partai Demokrat	Ketua DPD Partai Demorat Sulawesi Selatan
	2.Andi Rahmatika Dewi/Keponakan Ilham Arief	Anggota DPRD Kota Makassar (2009-2014)	Partai Golkar	Wakil Sekretaris Golkar Kota Makassar
Andi Idris Galigo	1.Andi Idris Galigo	Bupati Bone (2003-2008 dan 2008-2013)	Partai Golkar	Ketua DPD Golkar Bone, keluar dari Golkar karena konflik pilkada 2012
	2. Muh. Irsan Idris Galigo/ anak Idris Galigo	Anggota DPRD Sulawesi Selatan (2009-2014)	Partai Golkar	Ketua Soksi Kab. Bone, men-jadi caleg Nasdem 2014
Amin Syam	Amin Syam	Gubernur Sulawesi Selatan (2003 – 2008)	Partai Golkar	Mantan Ketua DPD Golkar Sulsel
	Imran Tenri Tatta/ anak Amin Syam	Anggota DPRD Makassar (2009 – 2014)	Partai Golkar	Wakil Sekretaris Partai Golkar Kota Makassar

Keluarga	Nama/Hubungan Kekerabatan	Jabatan	Partai Pengusung	Jabatan dalam Partai
Ibrahim Rewa	Ibrahim Rewa	Ketua DPRD Takalar (1999-2002) Bupati Takalar (2002–2007 dan 2007-2012)	Partai Golkar	Mantan Ketua DPD Golkar Kabupaten Takalar
	Natsir Ibrahim/anak Ibrahim Rewa	Anggota DPRD Takalar (2009 -2012) Wakil Bupati Takalar (2012-2017)	Partai Golkar	Ketua DPD Golkar Kabupaten Takalar
Padjalangi	Andi Yaqin Padjalangi	Anggota DPRD Sulawesi Selatan (2004 – 2009 dan 2009 – 2104)	Partai Golkar	Wakil Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan
	Andi Fashar Padjalangi / adik Yaqin Padjalangi	Wakil Bupati Bone (2003-2008) Bupati Bone (2013 -2018)	Partai Golkar	
	Andi Rio Idris Padjalangi/ adik Yaqin Padjalangi	Anggota DPR RI (2009 – 2014)	Partai Golkar	Wakil Bendahara Partai Golkar Sulawesi Selatan
Nurdin Halid	Nurdin Halid	Mantan anggota DPR RI	Partai Golkar	
	A. Kadir Halid/adik NurdinHalid	Anggota DPRD Sulawesi Selatan (1999 – 2004 dan 2009 – 2013)	Partai Golkar	Wakil Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan

Sumber: Diolah dari berbagai berita media

* Muhammad Yasin Limpo pernah menjabat sebagai Bupati Gowa, Bupati Maros dan Bupati Takalar

** Qahhar Muzzakkar adalah tokoh DI/TII

*** Kol (Purn) H.M. Arief Sirajuddin adalah mantan Bupati Gowa

KEKERABATAN DAN *LEGACY* SOSIAL POLITIK

Sulawesi Selatan merupakan bekas wilayah kerajaan Gowa, Tallo, Wajo dan juga kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Sistem pemerintahan pada masa kerajaan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan pada masa sesudahnya. Pada masa Belanda, para raja diangkat sebagai kepala daerah (*regent*) dan penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi pemerintahan juga diwarnai oleh kalangan bangsawan maupun teknokrat yang bergelar *andi*, *karaeng*, maupun *daeng*.

Pengangkatan para raja sebagai kepala daerah dan kaum bangsawan dalam birokrasi pemerintahan dipengaruhi oleh budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Meskipun memperoleh kekuasaan dari pemerintah Belanda, namun kalau bukan dari stratifikasi sosial yang tinggi maka tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan, karena dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan orang yang berasal dari stratifikasi yang lebih rendah tidak boleh memerintah orang dari stratifikasi yang lebih tinggi (Ahimsa Putra 1988: 53). Dengan demikian, maka elite kultural biasanya juga menjadi elite struktural. Pada masa kini, kaum bangsawan menyadari bahwa sta-

tus kebangsawanan mereka tidaklah cukup untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga diperkuat dengan pendidikan (S2/S3) maupun aktivitas dalam organisasi sosial, karena prestasi sosial merupakan sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan stratifikasi sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan.

Kuatnya fenomena politik kekerabatan di Sulawesi Selatan selain karena pewarisan elite struktural maupun fungsional, juga dipengaruhi oleh sosialisasi politik yang ada dalam keluarga. Dalam keluarga Yasin Limpo misalnya, diskusi ataupun pembicaraan tentang politik dilakukan secara terus-menerus sehingga menumbuhkan minat pada politik sejak dini di kalangan keluarga besarnya.

Dari beberapa keluarga politik yang ada di Sulawesi Selatan, keluarga Yasin Limpo adalah yang terbesar. Sosialisasi politik dalam keluarga Yasin Limpo yang dilakukan secara rutin memotivasi anggota keluarga untuk aktif dalam politik. Keluarga Yasin Limpo menyatakan bahwa diskusi-diskusi politik dalam keluarga merupakan pendidikan politik dan sekolah politik bagi mereka, bahkan juga bagi beberapa tokoh Sulawesi Selatan.

Dilihat dari jaringan organisasi sosial, anggota dari keluarga politik mewarisi organisasi sosial yang diikuti ataupun yang dipimpin oleh keluarganya. Ada kesamaan organisasi sosial dalam fenomena politik kekerabatan seperti keaktifan dalam organisasi KNPI, AMPI, FKPPi, yang merupakan organisasi sayap dari partai politik ataupun organisasi yang dekat dengan kekuasaan. Pengalaman dalam organisasi sosial memang tidak selalu dianggap sebagai prestasi, karena organisasi-organisasi seperti FKPPi, AMPI dan KNPI diwarnai oleh anak-anak pejuang, anak-anak pejabat ataupun anak-anak penguasa². Menjadi ketua organisasi sosial di daerah merupakan warisan orang tuanya. Seperti dikemukakan oleh Armin Mustamin Toputiri, bahwa pada masa Ore

² Pada tahun 2008, misalnya, Ketua DPD I KNPI Sulawesi Selatan: Ilhamsyah Azikin Solthan (putra Bupati Bantaeng, Azikin Solthan), Ketua DPD KNPI Jeneponto: Azhari Fachririe Karaeng Radja (putra Bupati Jeneponto, Radjamilo), Ketua DPD KNPI Pinrang: Andi Pawelloi Nawir (putra Bupati Pinrang, Andi Nawir Pasinrigi), Ketua DPD KNPI Sidrap: H Andi Faisal Ranggong (putra Bupati Sidrap, Andi Ranggong), Ketua DPD KNPI Maros: Ilham Najamuddin (putra Bupati Maros, Najamuddin Aminullah). Lihat dalam "Putra Bupati Rame-Rame Pimpin KNPI", *Tribun Timur*, 2 April 2008.

Baru, jabatan menjadi ketua KNPI merupakan tiket menjadi anggota DPRD ataupun DPR. Aktivitasnya dalam organisasi-organisasi tersebut memberikan kesempatan yang lebih besar kepada anggota keluarga politik untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan serta memberikan pengalaman politik dan organisasi yang merupakan modal dalam proses rekrutmen politik.

Seperti dikemukakan oleh Almond dan Verba yang diperkuat oleh Prewitt dan Martinez bahwa sosialisasi dalam keluarga ikut menentukan kelangsungan keluarga politik karena terdapat pewarisan pengetahuan dan keterampilan politik, sehingga kandidat yang berasal dari keluarga politik mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan dalam rekrutmen politik.

“Saya tertarik politik sejak orang tua saya menjadi ketua DPD Golkar saat itu, ya mulai dari itu. Kalau mencintai Partai Golkar sejak kecil, tapi mulai ikut-ikutan menjadi fungsionaris Partai Golkar itu mulai tahun 2003. Jadi mulai tahun 2003 sampai 2009 menjadi lebih dalam lagi. Tapi masuk dalam struktur kepengurusan itu mulai tahun 2009 (Wawancara dengan IT, 12 Mei 2014).”

Demikian pula yang dinyatakan oleh anggota keluarga politik lainnya yang terpilih dalam pemilu 2009 bahwa keluarga berpengaruh terhadap aktivitas politiknya.

“Oh, prosesnya panjang. Saya sudah menjadi kader partai sewaktu saya masih mahasiswa. Dan kakakku yang banyak ajari aku tentang politik, karena dia kan politisi. Jadi, keluarga saya banyak politisi. Jadi itu berpengaruh pada saya (Wawancara dengan AR, 23 April 2014).”

“Saya banyak diberi arahan dan diskusi. Keputusan yang saya ambil banyak dipengaruhi oleh keluarga, karena memang keluarga saya politisi (Wawancara dengan ARD, 8 April 2014).”

Tabel 3. Partai Politik, Daerah Pemilihan dan Organisasi Sosial Keluarga Politik di Sulawesi Selatan

Keluarga Politik (KP)	Partai		Basis Dukungan Daerah Pemilihan		Organisasi Sosial	
	Sama	Beda	Sama	Beda	Sama	Beda
KP 1	4	4	8	0	8	0
KP 2	2	1	3	0	3	0
KP 3	3	0	2	1	3	0
KP 4	1	1	2	0	1	1
JML	10	6	15	1	15	1
%	62.5	37.5	93.75	6.25	93.75	6.25

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Tabel 3 menunjukkan bahwa ada persamaan partai politik dan aktivitas dalam organisasi sosial dari para anggota keluarga politik. Ada 6 (enam) dari 16 (enam belas) anggota keluarga politik (37, 5%) yang mempunyai afiliasi politik yang berbeda dengan anggota keluarga lainnya. Perbedaan ini lebih dipengaruhi oleh munculnya partai-partai baru yang memberikan peluang bagi anggota keluarga politik untuk memperoleh kekuasaan. Bagaimanapun, Sulawesi Selatan merupakan lumbung suara bagi Partai Golkar, sehingga keluarga politik di Sulawesi Selatan berakar pada Partai Golkar. Bergabungnya anggota keluarga ke partai lain merupakan manifestasi dari pragmatisme politik dan upaya memperkuat kekuasaan keluarga dalam politik, melalui berbagai peluang yang ditawarkan pada era reformasi.

Selain kesamaan afiliasi politik, keluarga politik biasanya juga menjadi pengurus partai politik dan membentuk hubungan yang bersifat oligarkis di dalam kepengurusannya. Dalam organisasi partai yang cenderung oligarkis, peluang anggota keluarga politik untuk aktif dalam partai politik lebih besar, serta peluang untuk menjadi kandidat yang didukung oleh partai juga semakin membesar.

Kekuatan keluarga politik juga tercermin dalam pembagian daerah pemilihan. Ada kecenderungan terdapat kemiripan daerah pemilihan antara anggota yang satu dengan lainnya, meskipun tidak sama 100 persen, karena perbedaan tingkatan kompetisi sebagai politisi nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, ada interseksi yang sama antara daerah pemilihan dari anggota satu dengan lainnya sebagai basis

dukungan politiknya. Basis dukungan ini biasanya juga terkait dengan aspek etnis dari kandidat. Kandidat dari etnis Bugis berbasis daerah dengan mayoritas etnis Bugis, dan sebaliknya, kandidat dari etnis Makassar biasanya berbasis daerah dengan etnis Makassar. Dengan demikian, kandidat memperoleh dukungan jaringan partai, organisasi sosial, etnis maupun kekerabatan dari anggota keluarga yang lain. Sementara dilihat dari *legacy* organisasi sosial, hanya 1(6,25 %) dari 16 anggota yang berbeda aktivitas organisasi sosialnya. Perbedaan tersebut lebih karena perbedaan minat di luar organisasi sosial politik, sehingga terdapat satu anggota keluarga politik yang tidak aktif dan tidak mempunyai pengalaman dalam organisasi sosial politik sebelumnya.

Keluarga politik, selain menjadi elite struktural, biasanya juga menjadi elite kultural (kebangsawanan) dan elite fungsional (ekonomi). Latar belakang sebelum menjadi politisi antara lain berasal dari birokrasi pemerintahan (43,75%), pengusaha (43,75%) dan 12,5 % belum bekerja. Tingginya posisi keluarga politik di Sulawesi Selatan memperbesar modal politik, ekonomi dan sosial yang memberikan peluang yang lebih besar untuk terpilih dalam pemilu. Selain jaringan kekerabatan, jaringan birokrasi, jaringan partai dan jaringan patronase (baik etnis maupun ekonomi) merupakan faktor yang menentukan keluarga politik dalam kontestasi pemilu.

POLITIK KEKERABATAN DAN KUALITAS KANDIDAT

Fenomena politik kekerabatan ataupun politik dinasti merupakan fenomena umum di berbagai negara, baik negara yang sedang berkembang seperti Indonesia maupun negara maju seperti Amerika Serikat. Politik kekerabatan di Indonesia menjadi perdebatan terutama terkait dengan kompetensi kandidat yang berasal dari keluarga politik. Mereka dianggap hanya mendasarkan diri pada popularitas keluarga dan tidak disertai dengan kualitas yang dibutuhkan sebagai politisi. Mengacu kepada Almond dan Verba dan kualitas kandidat dari Jacobson dan Kernell, maka kualitas kandidat dalam penelitian ini dilihat dari relevansi pendidikan, pelatihan dan juga pengalaman politik sebelumnya.

Berdasarkan biografi keluarga politik dalam memperoleh jabatan politik pertama kali, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Rerata Indeks Kualitas Kandidat dalam Memperoleh Jabatan Politik Pertama

Keluarga	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman dalam Organisasi Partai	Pengalaman dalam Organisasi Sosial	Pengalaman dalam pekerjaan	Rata-Rata	Keterangan
KP 1	1.88	1.88	1.72	2.63	2.25	2.07	< 1,67= rendah
KP 2	1.75	2	2.13	2.63	2.87	2.28	1,67-2,33= sedang
KP 3	2.17	2.36	1.75	2.5	2.42	2.24	>2,33= tinggi
KP 4	1.5	1.83	1.88	2.25	2.13	1.92	
Rerata	1.83	2	1.9	2.6	2.5	2.17	

Sumber: Olah data dari Daftar Riwayat Hidup dan wawancara.

Secara umum, rata-rata indeks kualitas kandidat dalam memperoleh jabatan politik pertama kali pada keempat keluarga dalam katagori sedang, namun pengalaman dalam organisasi sosial dan pengalaman pekerjaan dalam katagori tinggi. Hanya satu keluarga yang mempunyai indeks pengalaman dalam organisasi sosial dalam katagori sedang (KP 4) karena salah satu anggota keluarganya sebelum memperoleh jabatan politik tidak mempunyai pengalaman dalam organisasi sosial. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kualitas kandidat yang berasal dari keluarga politik dalam katagori sedang yang berarti memenuhi kualifikasi yang disyaratkan untuk menjadi politisi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ketua DPD Golkar Kota Makassar mengenai kandidat yang berasal dari keluarga politik:

“... dia kan punya kapasitas. Walaupun bapaknya sudah berhenti, komunitasnya ada dan tetap dipertahankan. Jadi kita tidak melihat lagi dari anaknya siapa, tapi bagaimana kapasitasnya dan apakah orang ini mempunyai dampak pada organisasi (Wawancara dengan Ketua DPD Golkar Kota Makassar, 14 Maret 2014).”

Tingginya indeks pengalaman dalam organisasi sosial karena biasanya terjadi pewarisan aktivitas organisasi sosial dalam keluarga. Hal ini terkait dengan data yang menunjukkan bahwa 93,5 % anggota keluarga politik mempunyai aktivitas dalam organisasi sosial yang sama dengan pendahulunya. Indeks kualitas kandidat bila dilihat berdasarkan periode jabatan, tercermin dalam Tabel 5.

Tabel 5. Rerata Indeks Kualitas Kandidat dari Keluarga Politik (KP) dalam Memperoleh Jabatan Politik Pertama Kali di Sulawesi Selatan

Periode	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	Rerata Indeks	Keterangan indeks
Orde Baru	2,62	2,57	-	-	2,60	< 1,67= rendah
1999-2004	1,88	-	2,37	2,37	2,21	1,67-2,33= sedang
2004-2009	2,25	1,93	2,12	-	2,10	
2009-2014	1,53	-	2,15	1,27	1,65	>2,33= tinggi

Sumber: Olah data

Bila dilihat dari periode dalam memperoleh jabatan politik, Tabel 5 menunjukkan bahwa indeks kualitas kandidat pada saat memperoleh jabatan politik pertama kali pada masa Orde Baru dalam kategori tinggi, pada periode 1999-2004 dan 2004-2009 dalam kategori sedang, serta periode 2009-2014 dalam kategori rendah. Data tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan semakin rendahnya indeks kualitas kandidat pada era reformasi. Selain itu, generasi pertama yang memperoleh jabatan politik dari 4 (empat) keluarga politik, mempunyai indeks kualitas kandidat dalam katagori tinggi. Generasi pertama merupakan orang yang pertama memperoleh jabatan politik dalam suatu keluarga. Generasi pertama pada masing-masing keluarga politik merintis karir politik dari bawah dan aktif dalam berbagai organisasi sosial politik. Ada kecenderungan bahwa semakin panjang generasi keluarga politik, semakin rendah indeks kualitas kandidatnya. Hal ini tercermin dari rerata indeks kualitas kandidat yang memperoleh jabatan politik pertama pada tahun 2009 dalam kategori rendah. Rendahnya indeks kualitas kandidat ini juga dipengaruhi oleh semakin muda usia dalam memperoleh jabatan politik, seperti tabel berikut.

Tabel 6. Rerata Umur Kandidat dari Keluarga Politik (KP) dalam memperoleh jabatan politik pertama di Sulawesi Selatan

Periode	KP 1	KP			Rerata Umur
		2	3	4	
Orde Baru	39	43	-	-	40,5
1999-2004	38	-	39	34	37
2004-2009	43	31	39	-	37,7
2009-2014	27	-	36	24	32,3

Sumber: Olah data.

Pada masa Orde Baru, jabatan politik pertama diperoleh rata-rata pada usia sekitar 40 tahun, namun dalam setiap keluarga politik, usia dalam memperoleh jabatan politik pertama kali semakin muda. Berdasarkan wawancara dengan dua kandidat termuda, mereka menyatakan bahwa masuknya mereka dalam politik karena diminta oleh partai politik. Dua kandidat dengan indeks kualitas terendah juga menyatakan hal yang sama, bahwa mereka masuk dalam politik karena diminta oleh partai politik. Jadi sebenarnya terjadi simbiosis mutualisme antara kandidat dengan partai politik, di mana partai memperoleh keuntungan untuk mendapatkan kursi yang berasal dari keluarga politik, dan di sisi yang lain kandidat dari keluarga politik memperoleh peluang ataupun kendaraan untuk berkuasa. Apalagi partai politik cenderung menitikberatkan pada aspek elektabilitas dalam menentukan kandidat dan nama besar keluarga yang dinilai cukup menentukan dalam memperoleh dukungan publik.

Apabila Tabel 6 dikaitkan dengan Tabel 5, maka kandidat dengan indeks kualitas kandidat dalam katagori rendah adalah yang berumur 27 dan 24 tahun. Berdasarkan syarat umur menjadi anggota legislatif memang telah memenuhi syarat karena telah berumur lebih dari 21 tahun. Masih rendahnya indeks kualitas kandidat karena memang belum mempunyai pengalaman yang memadai, baik di partai politik, organisasi sosial maupun pekerjaan yang relevan dengan karir politiknya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu kandidat, dia menyatakan bahwa memang sebelumnya tidak aktif dalam politik dan belajar politik setelah menjadi anggota DPRD (Wawancara dengan salah satu kandidat terpilih, 8 April 2014).

Berdasar pada kualitas kandidat sebagai salah satu indikator politik kekerabatan, artikel ini menunjukkan bahwa tidak semua keluarga politik yang menduduki jabatan politik merupakan manifestasi dari politik kekerabatan. Berdasarkan periode dalam memperoleh jabatan politik, kualitas kandidat pada periode 2009-2014 dalam kategori rendah sehingga bisa dikatakan bahwa politik kekerabatan terjadi pada periode tersebut. Sedangkan pada periode-periode sebelumnya, kualitas kandidat dalam katagori sedang sehingga termasuk memenuhi kualifikasi,

sehingga dari perspektif kualitas kandidat tidak termasuk dalam politik kekerabatan, meskipun berasal dari keluarga politik.

KEKERABATAN DAN PEROLEHAN SUARA

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dal Bo, Querobin dan Hess menunjukkan bahwa kandidat yang berasal dari keluarga politik mempunyai peluang yang lebih besar untuk terpilih dalam pemilu. Hasil penelitian ini juga menunjukkan hal yang sama, bahwa kandidat yang berasal dari keluarga politik cenderung memperoleh dukungan suara yang lebih besar. Dari 6 (enam) kandidat yang berasal dari keluarga politik dalam pemilu 2009, 4 (empat) di antaranya memperoleh suara terbanyak dalam daerah pemilihannya. Satu kandidat berada pada nomor urut 2 karena berkompetisi dengan *incumbent* dan satu orang berada pada nomor urut 3 karena nomor urut 1 dan 2 berasal dari keluarga politik lainnya. Tingginya perolehan suara kandidat dari keluarga politik juga dipengaruhi oleh dukungan keluarga baik secara langsung dalam proses kampanye maupun dukungan moril di belakang panggung. Apalagi terdapat kecenderungan pula adanya interseksi daerah pemilihan dengan pejabat politik sebelumnya sehingga lebih memudahkan dalam menggerakkan ataupun mempertahankan konstituen.

Tabel 7. Nomor Urut Caleg dan Perolehan Suara

Informan	No Urut Dapil	Perolehan Suara	No Urut perolehan suara di Dapil	No urut Perolehan suara di partai	Level Pencalonan
1	3	35.991	1	2 dari 3	Nasional
2	2	31.893	1	1 dari 10	Provinsi
3	8	2.947	1	8 dari 11	Kota
4	6	83.334	1	1 dari 18	Provinsi
5	6	3.551	3	6 dari 11	Kota
6	5	64.541	2	2 dari 8	Nasional

Sumber: Olah data.

Terpilihnya kandidat yang berasal dari keluarga politik juga dipengaruhi oleh sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak. Meskipun kandidat dari keluarga politik berada pada nomor urut bawah, hal ini tidak mempengaruhi perhitungan dalam menentukan kursi karena

berdasarkan kepada perolehan suara terbanyak. Dari 6 (enam) kandidat, hanya satu yang berada pada nomor urut 2 karena merupakan pengurus partai, sedangkan lainnya berada pada nomor urut 3 dan sesudahnya.

Tabel 8.: Jumlah Anggota Keluarga Politik dalam Jabatan Politik

Periode	KP	KP	KP	KP	Jumlah
	1	2	3	4	
Orde Baru	3	1	-	-	3
1999-2004	3	1	1	1	6
2004-2009	5	1	2	1	9
2009-2014	6	1	3	2	12

Sumber: Olah data.

Dilihat dari periode dalam memperoleh jabatan politik, terdapat kecenderungan bahwa jumlah keluarga politik dalam jabatan politik semakin banyak. Dari 4 (empat) keluarga politik, pada masa Orde Baru terdapat 3 (tiga) pejabat politik, namun pada periode 2009-2014 terdapat 12 pejabat politik. Dari 12 pejabat politik tersebut, 3 (tiga) orang merupakan Kepala Daerah dan 9 (Sembilan) orang merupakan anggota legislatif, baik di level nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa era reformasi memberikan peluang yang lebih besar kepada keluarga politik untuk memperbesar pengaruhnya dalam politik, baik melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung maupun sistem pemilu proporsional suara terbanyak yang disertai dengan munculnya partai-partai baru.

Pada kenyataannya, afiliasi partai politik pada satu keluarga tidak selalu sama, tergantung kepada kesempatan yang diberikan oleh partai politik untuk memperoleh kekuasaan. Menurut Prewitt, sosialisasi politik akan mempengaruhi identifikasi partai politik, namun dalam konteks Sulawesi Selatan, identifikasi partai politik lebih dipengaruhi oleh pragmatisme politik. Apalagi tidak terdapat perbedaan ideologis yang tegas antara partai satu dengan lainnya.

“Dalam keluarga kami, partai beda, segmen beda, lini perjuangan beda, tapi tujuannya satu. Jadi tidak ada masalah. Yang penting dalam keluarga kami itu tidak ada pertentangan. Kalau partai itu kan cuma wadah, cuma bendera. Tapi tujuan kita kan satu. Keluarga

kami itu sangat demokratis. Tidak ada kamu di larang di sini, kamu di larang di situ. Selama masih di lini perjuangan ya nggak masalah. (Wawancara dengan ITC, 14 Mei 2014)."

Partai merupakan kendaraan politik bagi keluarga politik untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaannya. Hal ini tercermin dari adanya perbedaan partai dalam satu keluarga. Perbedaan partai politik bisa terjadi pada sesama partai yang berideologi nasionalis misalnya, namun bisa pula perbedaan partai dengan perbedaan ideologi antara nasionalis dan agama ataupun partai berbasis massa agama. Hal ini terjadi karena dalam realitasnya tidak terdapat perbedaan ideologi yang kuat antara partai yang satu dengan yang lain. Partai Golkar sebagai partai nasionalis misalnya, juga menampilkan simbol-simbol agama dalam menarik konstituen. Dengan demikian, tidak ada ikatan yang kuat antara partai politik dengan calon ataupun politisi dari keluarga politik, namun lebih kepada pragmatisme politik. Rendahnya ikatan kandidat dengan partai politik tercermin dari mudahnya kandidat berganti partai. Dari 6 (enam) kandidat yang terpilih dalam pemilu 2009, 3 (tiga) orang diantaranya berpindah partai pada pemilu 2014 karena kepentingan mereka tidak diakomodir lagi oleh partai yang lama.

KEKERABATAN DAN DEMOKRASI

Inti dari demokrasi adalah adanya kesetaraan, adanya kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan (Jack Lively 1975). Perspektif demokrasi inilah yang sering digunakan untuk menyoroiti fenomena politik kekerabatan di Indonesia. Dalam perspektif pluralis, setiap elemen masyarakat mempunyai peluang yang sama, namun fenomena politik kekerabatan sering dianggap sebagai penghambat demokrasi karena tidak terjadinya sirkulasi elite. Padahal sebenarnya, antara kesetaraan dan sirkulasi elite bukan merupakan satu paket dalam konsep demokrasi, karena pelaksanaan demokrasi tidak terjadi dalam ruang hampa. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang tentang pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan aspek kesetaraan, maka

hak konstitusional warna negara, termasuk dari keluarga politik tidak boleh dihilangkan.

Selain kelemahan dari konsep demokrasi, tidak terjadinya sirkulasi elite dipengaruhi oleh berbagai faktor. **Pertama**, hubungan antara penguasa dengan rakyat masih diwarnai oleh pola hubungan patronase budaya dan klientelisme ekonomi politik yang kuat. Budaya patronase dan klientelisme ini semakin memperkuat politik kekerabatan karena kandidat dari keluarga politik yang mempunyai sumberdaya ekonomi yang dibutuhkan untuk memelihara patronase dan klientelisme. Hal ini bisa dilihat dari preferensi rakyat dalam pemilu yang masih banyak melihat kepada siapa elite-elite yang ada dalam pencalonan daripada kapasitas dan kapabilitas kandidat. **Kedua**, masih kuatnya oligarki partai sehingga dalam rekrutmen politik juga sangat diwarnai oleh kepentingan elite partai.

Dalam konteks politik kekerabatan dan kualitas kandidat, maka perlu dibangun hubungan simbiosis mutualisme antara partai politik dengan masyarakat dalam pemilu yang berbasis kepada kepentingan masyarakat. Caranya adalah dengan berupaya mencerdaskan masyarakat dalam memilih kandidat terbaik yang kompeten di satu sisi dan di sisi yang lain partai politik menawarkan kandidatnya yang berkualitas, tidak sekedar populer untuk mendulang suara. Kualitas kandidat dan mekanisme rekrutmen yang demokratis merupakan benteng dalam meminimalisir praktik politik kekerabatan.

KESIMPULAN

Setiap fenomena keluarga politik yang memperoleh jabatan politik dianggap sebagai politik kekerabatan. Hal ini karena tidak jelasnya konsep mengenai politik kekerabatan. Politik kekerabatan bukan hanya mengenai dimensi jumlah (dua orang atau lebih yang menduduki jabatan politik), dimensi waktu (keluarga dari pejabat politik sebelumnya, dua periode kekuasaan), dimensi jabatan politik (jabatan yang sama ataupun berbeda) dan dimensi kekuasaan (mempertahankan atau memperbesar kekuasaan) seperti dikemukakan oleh Hess, Casey, Dal Bo maupun Asako. Ada dimensi penting yang belum terdapat karakteristik politik

kekerabatan, yaitu rekrutmen politik, yang meliputi aspek prosedur rekrutmen dan kualitas kandidat.

Dengan mengacu kepada teori sosialisasi Almond dan Verba dan kualitas kandidat dari Jacobson dan Kernell, artikel ini menunjukkan bahwa kualitas kandidat yang berasal dari keluarga politik cukup beragam. Ada yang termasuk dalam kategori tinggi dan sedang yang berarti memenuhi kualifikasi dalam proses rekrutmen, namun juga terdapat kandidat dengan indeks kualitas kandidat dalam kategori rendah yang berarti kurang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam rekrutmen. Konsekuensinya adalah bahwa tidak semua keluarga politik yang terpilih dalam pemilu merupakan manifestasi dari politik kekerabatan.

Berdasarkan kualitas kandidat pada periode dalam memperoleh jabatan politik dalam penelitian ini, politik kekerabatan terjadi dalam periode 2009-2014. Hal ini karena terdapat kecenderungan bahwa semakin panjang generasi politik dalam suatu keluarga politik, indeks kualitas kandidat semakin rendah yang dipengaruhi oleh semakin mudanya usia dalam memperoleh jabatan politik. Majunya kandidat dengan indeks kualitas yang rendah justru diminta oleh partai politik. Jadi terdapat simbiosis mutualisme antara partai politik dengan kandidat, yang mana partai politik membutuhkan kandidat populer untuk memperoleh kursi di lembaga perwakilan, dan di sisi yang lain kandidat menggunakan partai politik sebagai kendaraan politik untuk meraih kekuasaan.

Terdapat kecenderungan pula bahwa fenomena politik kekerabatan yang semakin menguat di era reformasi dipengaruhi oleh peluang yang ada, baik melalui pemilihan kepala daerah secara langsung maupun pemilu dengan sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak, serta munculnya partai-partai baru. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh keluarga politik dengan mengoptimalkan jaringan politik, sosial dan kekerabatan sehingga memperoleh dukungan publik yang cukup besar. Oleh karena itu, upaya untuk meminimalisir politik kekerabatan perlu dilakukan dengan membangun hubungan simbiosis mutualisme antara partai politik dengan masyarakat, yang mana partai merekrut kandidat yang berkualitas secara demokratis dan masyarakat cerdas memilih kandidat yang berkualitas untuk mewakili mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1989. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, New Jersey: Princeton University Press.
- Asako, Yasushi. *et.al.* 2012. *Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan*, Waseda University Organization for Japan-US Studies. Working Paper No. 201201.
- Casey, Kimberly Lynn. 2009. "Family Matters: The Prevalence and Effects of Political Families in National Politics." Ph.D diss. University of Missouri.
- Dal Bo, E., Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder. 2006. "Political Dynasties", Diunduh dari SSRN: <http://ssrn.com/abstract=909251>.
- Djati, W. R. 2013. "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal." *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, 18 (Juli), No. 2: 203-231.
- Jacobson, Gary C. dan Samuel Kernell. 1983. *Strategy and Choice in Congressional Elections*. New Haven: Yale University Press.
- Kurtz II, Donn M. 1989. "The Political Family: A Contemporary View." *Sociological Perspectives* 32 (Autumn), No. 3: 331-352.
- _____. 1993. Ed. *The American Political Family*, Lanham MD: University Press of America.
- Liefferinge, H. van dan Kristof Steyvers. 2009. "Family Matters? Degrees of Family Politicization in Political Recruitment and Career Start of Mayors in Belgium." *Acta Politica*, 44, No. 2: 125-149.
- Lively, Jack. 1975. *Democracy*, Oxford: Basil Blackwell.
- Martinez, Lisa M. 2010. "Politizing the Family: How Grassroots Organizations Mobilized Latinos for Political Action in Colorado." *Latino Studies*, 8 (Winter), No. 4: 463-484.
- Mendoza, R. U. *et.al.* 2012. "Inequality in Democracy: Insights from an Empirical Analysis of Political Dynasties in the 15th Philippine Congress." *Philippine Political Science Journal*, 33, No. 2: 132-145.
- Nordholt, H. S. dan G. van Klinken. 2007. Eds. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Norris, Pippa. 1997. *Passages To Power: Legislative Recruitment in Advanced Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Norris, Pippa dan Joni Lovenduski. 1993. "If Only More candidates Came Forward: Supply-Side Explanation of Candidate Selection in Britain." *British Journal of Political Science*, 23 (Juli), No. 3: 373-408.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 1988. *Minawang: Patron dan Klien di Sulawesi Selatan, Sebuah Kajian Struktural-Fungsional*, Gadjah Mada University Press.
- Querubin, Pablo. 2011. *Political Reform and Elite Persistence: Term Limits and Political Dynasties in the Philippines*, paper dipresentasikan pada APSA Annual Meeting.
- Smith, Daniel Markham. 2012. "Succeeding in Politics: Dynasties in Democracies." Ph.D diss. University of California.

